



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIAR RUSWIDJANARKO
2. Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU II
3. NHK : 226833

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **703.080.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/80 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 148.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1592 m2/57 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 130.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 107 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 130.500.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 109.550.000
5. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 184.030.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **324.050.000**

1. LAINNYA, ---(SEPEDA LISTRIK BEATRIX) SEPEDA Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 150.000
2. LAINNYA, SEPEDA GUNUNG UNITED DOMINATE SEPEDA GUNUNG BEKAS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000
3. MOTOR, YAMAHA AEROX B65-A Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 22.500.000
4. LAINNYA, PACIFIC SEPEDA LIPAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000



5. MOBIL, TOTOTA RUSH GR Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
258.500.000
6. MOTOR, HONDA CBR 250 CC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
38.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	43.282.500
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	471.190.632
F. HARTA LAINNYA	Rp.	67.272.195
Sub Total	Rp.	1.608.875.327

III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.608.875.327

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.